

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Progam Studi Mu'amalah
(Hukum Ekonomi Syari'ah)

Program Studi : Mu'amalah



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2020M

**“ANALISIS PASAL 44B AYAT 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari’ah**

Oleh :

**Tanti Aulia
NPM. 1621030262**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

TAHUN 1441H/2020 M

ABSTRAK

ANALISIS PASAL 44B UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Tanti Aulia

Indonesia merupakan Negara hukum dan hukum sifatnya memaksa dan harus dipatuhi maka salah satu penetapan hukum di Indonesia ialah Pajak, karena Pajak merupakan suatu iuran yang di paksakan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dan secara tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh Wajib Pajak maupun masyarakat, maka salah satu bentuk produk hukum bagi Wajib Pajak yang melanggar dan melakukan kecurangan ialah berupa sanksi, baik sanksi administrasi, maupun sanksi pidana kurungan atau penjara. Sanksi ada Pasal 44B ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengubah sanksi pidana kurungan maupun penjara menjadi sanksi administrasi berupa denda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana denda pada Pasal 44B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan denda tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memberikan Penjelasan bagaimana penerapan sanksi administrasi berupa denda baik secara hukum positif maupun hukum Islam pada Pasal 44B bagi para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori, dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 44B sudah dilaksanakan pada beberapa kasus tindak pidana di bidang Perpajakan untuk menghentikan pemeriksaan. Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda diperbolehkan atau Mubah sesuai dengan prinsip umum *fiqih muâmalah* yaitu, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'ân dan Sunnah Rasul.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PASAL 44B UNDANG-UNDANG NO.
16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Tahti Aulia
NPM : 1621030262
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Abdul Odin Zaelani, S.H.I, MA
NIP. 198206262009011015

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 1978072520091210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : ANALISI PASAL 44B AYAT 1 DAN 2
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM disusun oleh : Tanti
Aulia, NPM. 1621030262, Jurusan: Muamalah, telah diujikan
dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M

(.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

(.....)

Penguji III : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210219930310002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Terjemahannya dan Terejemahannya dan Azbabunuzul....*, h. 106

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Bapak dan ibuku tercinta, Bapak Elva Santoso dan Ibu Hartati, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan Adik saya Syaharani Putri yang selalu mendukung dan mendoakan, dan Keluarga besarku yang selalu memberikan nasehat serta dukungan dan mendoakan atas kesuksesanku
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta

RIWAYAT HIDUP

Tanti Aulia dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 11 januari 1998 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Elva Santoso dan Ibu Hartati adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak ditempuh di TK Islam Citra Insani di Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2004
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 03 Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2010
3. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 10 Kotabumi, di Kecamatan Kelapa Tujuh, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2013
4. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMK Negeri 1 Kotabumi, di Kecamatan Kelapa Tujuh, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2016
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ketingkat pendidikan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ANALISI PASAL 44B AYAT 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, parasahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercintaini
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Selaku Pembimbing I yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswa
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Seseorang yang selalu memberikan energi positif di kehidupanku Qisra Lutfi Ranev, yang selalu mendukung disetiap saat dan turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
8. Diana Novita Sari dan Yuvita Tri Rejeki yang selalu membantu
9. Teman-teman seperjuangan KKN 185 Desa ngarip yang telah memberikan banyak Pengalaman
10. Teman- teman PPS Akselerasi 01 yang turut membantu suksesnya jalan menuju munaqasah
11. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Mua'malah E
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang dimiliki, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Islam di abad modern ini

Bandar Lampung , Februari 2020

Penulis,

Tanti Aulia
NPM. 1621030262



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	13
B. Tinjauan Pustaka.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. Substansi Pasal.....	45
B. Pembahasan	71

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisi Hukum Terhadap Denda pajak Pasal 44b Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Perpajakan	78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Analisi Hukum Islam terhadap Denda Pajak Pasal 44B Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Perpajakan	79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

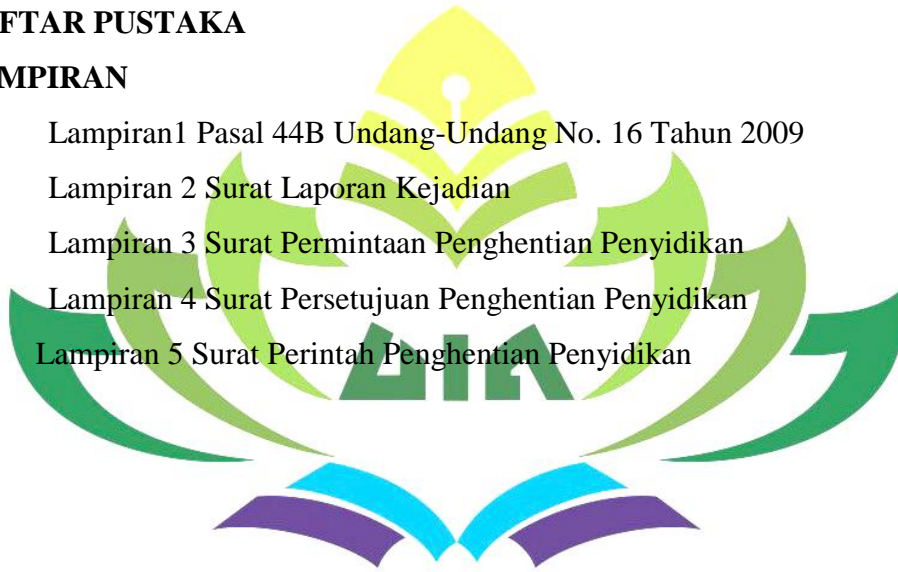
BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran1 Pasal 44B Undang-Undang No. 16 Tahun 2009
- Lampiran 2 Surat Laporan Kejadian
- Lampiran 3 Surat Permintaan Penghentian Penyidikan
- Lampiran 4 Surat Persetujuan Penghentian Penyidikan
- Lampiran 5 Surat Perintah Penghentian Penyidikan



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah : **“Analisis Pasal 44B Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam Prespektif Hukum Islam (KUP)”**. Istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut perlu di jelaskan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman sebagai berikut:

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²

Analisis yang dimaksud dalam judul ini adalah bagaimana analisi denda dalam Pasal 44B Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam (KUP).

Pasal 44B ayat 1 dan 2 adalah pasal yang menjelaskan tentang Penyidikan Perpajakan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan

² Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gitamedia Press 2015), h. 50

timbulnya kewajiban Warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang Pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah.³

Denda adalah hukuman dengan membayarkan sejumlah uang dan merupakan salah satu hukuman pokok dalam KUHP. (KUHP Ps. 10/4).⁴

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt. Dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana “Analisis Pasal 44B Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam Prespektif Hukum Islam” adalah suatu kajian tentang penyelidikan konsep pemberlakuan sanksi administrasi denda Pajak yang diatur atau dijelaskan dalam pasal 44B Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, mengingat Pajak akan selalu menjadi bagian dari hidup masyarakat, dan semakin banyak masyarakat yang kurang paham

³ Ardian Sutedi, *Hukum Pajak (Jakart: Sinar Grafika, 2019)*, h. 1

⁴ Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik* (Bandung: Angkasa Bandung, 1996), h. 51

⁵ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fqih Cet ke-I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

betapa pentingnya Pajak untuk masyarakat sendiri dan semakin banyak pula pelanggaran terhadap pembayaran Pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan di atas serta menjadi masukan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan diatas sehingga perlu pembahasan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kegiatan muamalah tersebut. Penelitian terdahulu tentang Analisis Pasal 44B Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2. Alasan Subyektif, dari aspek yang di telah diteliti mengenai permasalahan tersebut ditinjau dari bahasa serta tersedianya literatur yang menunjang maka sangat mungkin dilakukan penelitian. Dan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang Analisis Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam hal denda, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan, secara tidak sadar kita setiap hari sudah membayar Pajak dalam bentuk makanan yang kita bayar sehari-hari, dan Pajak merupakan salah satu kewajiban yang

harus dilaksanakan atau dibayarkan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Dalam bahasa Arab, Pajak dikenal dengan berbagai nama dan sebutan, yang masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Seperti *adh-dharībah* artinya Pajak atau pungutan dan sering didefinisikan sebagai Harta yang dipungut dari sumber-sumbernya atau dari *jizyāh* dan lainnya.⁶ Kalangan yang mengaramkan Pajak berhujah dengan dalil-dalil yang umum dan khusus, misalnya firman Allah Swt :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...(QS. An-Nisa' : 29).

Dalil tersebut lebih tepat diterapkan pada zaman jahiliah di masa sebelum kenabian, namun setelah kedatangan risalah Islam, Pajak masih ada meski dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, dan Pajak wajib untuk dilaksanakan.

Sistem pemungutan Pajak di Indonesia yang menganut *Self Assement System* yakni sangat mengharapkan peran serta, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus dibayar tanpa ada kecurangan.

⁶Ahmad sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indoneisa Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), h. 397

Namun dalam praktiknya pembayaran Pajak ditengah-tengah masyarakat tidaklah berjalan lancar seperti yang Pemerintah inginkan, banyak Wajib Pajak yang melanggar aturan yang telah diatur oleh Pemerintah, seperti menerbitkan faktur yang tidak sesuai, padahal Pajak sendiri akan dirasakan juga oleh masyarakat. Dalam rangka agar baik masyarakat wajib Pajak maupun aparat Perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus untuk mewujudkan unsur Pajak yang dapat dipaksakan sebagaimana didefinisikan, maka dituangkan ketentuan sanksi Perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi bagi wajib Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Sanksi-sanksi dalam Perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, bunga, kenaikan, serta sanksi pidana Perpajakan yang meliputi sanksi bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.⁷ Salah satu peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perpajakan terdapat dalam Pasal 44B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Isi pasal tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan Pajak bila ada permintaan dari Menteri Keuangan yang didasarkan pada kepentingan penerimaan Negara (ayat 1). Penghentian penyidikan tersebut dilakukan sepanjang wajib Pajak

⁷ Ardian Sutedi, *Hukum Pajak*..., h.221

mau melunasi utang Pajak ditambah sanksi denda empat kali jumlah Pajak yang kurang atau kurang dibayar (ayat 2).

Bisa diartikan bahwa persidangan akan dihentikan jika wajib Pajak membayar utang Pajak dan membayar sanksi administrasi denda sebesar empat kali lipat, jika di lihat dari filosofi Pajak sendiri memang akan memberatkan pada penerimaan Negara, apalagi dengan adanya sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut cukup banyak untuk penghasilan Negara. Penerimaan Pajak untuk Negara lebih dipentingkan daripada proses penyelesaian hukum di pengadilan, penyelesaian di pengadilan memang akan memakan waktu yang sangat lama bahkan bertahun-tahun sampai pada hukum yang *inkracht* atau pasti.

Sedangkan penerimaan Pajak untuk Negara harus sesegera mungkin, karena peran Pajak dalam APBN yang semakin meningkat membuat Pemerintah harus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek Pajak. Tetapi di sisi lain, melihat kepastian hukum Pajak harus di tuntaskan melalui proses pengadilan. Dalam hukum Islam apakah dengan membayar sanksi administrasi berupa denda suatu permasalahan atau pelanggaran hukum dapat terselesaikan?

Denda pembayaran Pajak dapat disamakan atau diartikan dengan *ta'zīr* dalam fikih. *Ta'zir* sendiri dalam istilah bahasa Arab digunakan untuk denda adalah *gharāmah*. Secara bahasa *gharāmah* berarti denda, *Ta'zīr* secara bahasa berarti *ta'dīb* yang berarti memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *al-raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak atau

mencegah.⁸ Sedangkan denda dalam hukum positif merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapan sebuah sanksi administrasi berupa denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambāli, termasuk Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Mālikī, ulama Mazhab Ḥanafī, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr*.

Disinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah sanksi administrasi denda Pajak yang terdapat pada pasal 44B ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bisa di terapkan dan berjalan efektif, dan apakah dalam hukum Islam sanksi administrasi denda Pajak ini bisa di terapkan.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12.

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda Pajak yang terdapat didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan hanya pada pasal 44B ayat 1 dan 2.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan denda Pajak pada Pasal 44B Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda Pajak pada Pasal 44B Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Karena adanya penerapan denda pada pasal 44B ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP) sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subyektif

Pembahasan ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

Berdasarkan data jurusan belum ada yang membahas pokok-pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar mengetahui konsep pelaksanaan Pasal 44B ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang KUP
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam penyidikan persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44B ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penelitian (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang di teliti. Dan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,⁹ di dalam pasal 44B Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Deskriptif yang di maksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Sumber Data

Data ini termasuk data sekunder, yaitu terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yang bersumber pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012), h. 44

- b. Bahan hukum sekunder, yang bersumber pada buku-buku yang membahas tentang Pajak, dan denda.
- c. Bahan buku Tersier, yang berseumber pada Media Internet, Kamus, dan Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber bacaan yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan lain-lain, khususnya masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang masuk (*raw data*) perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiaannya, barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan ini disebut editing yang dapat dilakukan ditempat penelitan pusat (*office editing*). Dengan demikian diharapkan akan memperoleh data yang *valid* dan *reliable*, dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

b. Rekontruksi Data

¹⁰ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta:Fajar Agung,1989), h. 64

Rekontruksi data, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

c. Sistematika data

Sistematika data bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian ditandai menurut jenis atau kategori dan urutan masalah.

5. Metode Analisa Data

a. Analisis data

Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan laporan. Dan metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, analisis hukum Islam tentang pelaksanaan pasal 44B Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara deduktif, yaitu analisis yang bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan

yang bersifat umum melalui analisa yang benar, kemudian ditarik suatu kesimpulan ditarik yang bersifat khusus



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Ketentuan Umum Pajak

a. Pengertian Pajak Secara Umum dan Syariah

Pajak secara umum adalah pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk membiayai pengeliraran Negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.¹¹

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.”¹²

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “Pajak” yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak menurut NJ. Feldmann, menurutnya Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut Norma-Norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.¹³

¹¹Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), h.19

¹²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 23A

¹³Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntut Prakti* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.2

2. Pengertian Pajak menurut Edwin E.A. Seligman, *“Tax is compulsory contribution from the person to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without refrence to special benefit conferred.”* Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga Pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.¹⁴
3. Pengertian Pajak menurut Philip E. Taylor, dia hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*.¹⁵
4. Pengertian Pajak menurut Smeets, Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui Norma-Norma umum dan yang dapat dipaksannya, tanpa adanya kontrapertasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.¹⁶
5. Menurut Ray M. Sommer, Hershel M. Andersen dan Horace R. Brock *“A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without reference to specific benefits recevid, so as too accomplish some of nation’s economic nd social objectives”* artinya: Pajak dapat didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber dari sektor Swasta ke sektor Pemerintah,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Ardian Sutedi, *Hukum Pajak....*, h.3

¹⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 2

yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung, sehingga Pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.¹⁷

6. Menurut P.J.A Adriani, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.¹⁸

7. Menurut Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan Norma hukum, guna menutup biaya produksi barang jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁹

Dalam pembahasan pengertian Pajak, maka unsur-unsur dari definisi Pajak meliputi sebagai berikut:

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib, lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

¹⁷Ardian Sutedi, *Hukum Pajak*..., h. 2

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Santoso Brothofiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 3

3. Perpindahan atau penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang atau peraturan atau Norma yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari Pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi: (1) Pembangunan infrastruktur, (2) Sarana kesehatan, dan (3) *Public facility*.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun Pemerintah) digunakan oleh pemungut (Pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.

Selain unsur Pajak, Pajak juga memiliki fungsi sebagai berikut²⁰:

1. Fungsi *budgetary* (penerimaan), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) Pemerintah.
2. Fungsi *regulerend* (mengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.²¹

Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

²⁰Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan* (Yogyakarta: . Andi Offset, 2009), h. 1

²¹Mardiasmo , *Perpajakan Edisi Revisi 2006* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h.2

3. Tarif Pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produksi di pasaran Indonesia di pasaran dunia.

Dengan demikian, ciri khas Pajak dibandingkan dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib Pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari Pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek Pajak ada menerima jasa timbal, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat.²²

Dari definisi di atas terlihat bahwa Pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang disusun dan dibahas bersama-sama antara Pemerintah dan DPR, sehingga Pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak Rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Undang-Undang Perpajakan sendiri tidak memberikan definisi Pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 198 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adapun definisi Pajak menurut Undang-Undang tersebut yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”.²³

Sedangkan Pajak Secara Syari’ah, Pajak dikenal dengan berbagai istilah dan memiliki arti yang berbeda, seperti²⁴ :

²² Ardian Sutedi, *Hukum Pajak....*, h.7

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan., Pasal 1 ayat (1).

²⁴ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat....*, h.396

1. *Al-'Usry*, istilah *Al-'usyr* secara bahasa berarti sepersepuluh. Dalam praktiknya, sepersepuluh yang dimaksud adalah nilai harta yang dipungut dari pedagang atau dari hasil bumi. Pihak yang memungut nilai sepersepuluh itu disebut dengan *Al-asyshaar*.
2. *Al-Maks*, istilah *Al-maksu* secara bahasa bermakna *an-naqshu*, yaitu pengurangan, dan juga bermakna *adz-dhulmu*, yaitu perampasan. Orang yang melakukan pemungutan disebut dengan *Al-makis*
3. *Adh- Dhâribah*, istilah *adh- dhâribah* artinya Pajak atau pungutan dan sering didefinisikan sebagai harta yang dipungut dari sumber-sumbernya atau dari *jizyah* dan lainnya.
4. *Al-Kharaj*, istilah *Al-kharaj* berasal dari kata *kharaja* yang bermakna keluar. Secara istilah, yang dimaksud *Al-kharaj* sebagaimana disebutkan oleh Mawardi adalah, apa yang ditetapkan atas pemilik tanah dalam bentuk pungutan yang harus ditunaikan.
5. *Jizyah*, istilah *jizyah* adalah harta yang wajib dibayar oleh non muslim dengan akad tertentu, sebagai imbalan jaminan keamanan mereka dan tempat tinggal mereka di wilayah Islam. Dinamakan *jizyah* (menurut bahasa berarti cukup) karena cukup untuk menghindarkan mereka dari pembunuhan, peperangan dan lain-lain.²⁵

²⁵ Syakih Musthafa Deib Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Islam Syāfi'i*, (Kemang: Fatha Media Prima, 2018) h .349

b. Dasar Hukum Pajak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1) Dasar Hukum Pajak dalam Hukum Positif

Berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur Perpajakan di Indonesia:

- a) Undang-Undang Dasar Pasal 23A
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- e) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.
- f) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
- g) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak.

2) Dasar Hukum Pajak dalam Hukum Islam

Allah Ta'ala berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صِغُرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk..... (Q.S. At-Ttahubah [9]: 29)

Jizyah ialah Pajak perkepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Imam Syāfi’I berkata, “yang dimaksud dengan “dalam keadaan tunduk” pada ayat di atas adalah, mereka tunduk terhadap hukum-hukum Islam yang diberlakukan kepada mereka.” Imam Bukhārī dan Muslim meriwayatkan dari ‘Amr Ubaidah bin Al-Anshari, ia berkata “Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke daerah Bahrain, untuk mengambil *jizyah* (Pajak) dari para penduduknya.”²⁶

c. Pendapat Ulama Tentang Pajak

Banyak perbedaan pendapat tentang Pajak ada ulama yang mengharamkan Pajak ada pula yang menghalalkan Pajak, sebelum membahas perbedaan tersebut berikut beberapa pendapat ulama tentang Pajak:

1) Al-Imam An-Nawawi

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadist yang mengisahkan dilaksakannya hukum rajam atas zina yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Ghamidiyah. Setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid *radhiyallahu anhu* menghampiri wanita itu

²⁶ Syakih Musthafa Deib Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syāfi’I*, h .349

dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencacinya, Rasulullah saw. Pun bersabda:

مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ
تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

Artinya: “Pelan-pelan, wahai Khalid, demi Zat yang dijiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang apabila penarik atau pemungut Pajak mau bertahub (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi saw. Menasihatinya, lalu dikuburkan.” (HR. Muslim.)²⁷

Al-Imam An-Nawai rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa hikmah yang agung di antaranya bahwasannya Pajak termasuk sejahat-jahatnya kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan pelakunya, hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan banyak tuntutan di akhir nanti.

2) Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berpendapat bahwa para petugas yang ditugaskan untuk mengambil uang denda yang wajib dibayar di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu gerbang kota, dan apa-apa yang biasa dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk Pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zalim yang teramat besar,

²⁷ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, h. 399, mengutip Al-Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, jilid 11, h. 202

(hukumannya) haram, dan fasik.²⁸ Sehingga tidak mengherankan jika banyak kalangan ikut mengharamkan Pajak. Sebab dalil-dalilnya secara lahiriah memang demikian, apalagi banyak pendapat ulama salaf yang ikut mengharamkan.²⁹

Belum ada fatwa halal tentang Pajak sampai hari ini belum ada fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa Pajak itu halal. Kita harus khawatir, jika Pajak itu haram pasti akan membawa dampak buruk kepada Negara, Karena kita semua sudah memakan sesuatu yang haram, termasuk petugas Pajaknya.³⁰

Sebagaimana firman Allah Swt.:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”...(QS Al-Baqarah [2]:168)

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fukaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum Muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat

²⁸ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.399, mengutip Ibnu Hazm, *Maratib Al-Ijma*, h. 21

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Depok: Rajawali Pres, 2009), h. 11

Ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat
Berikut alur logikanya:

1. Pajak Bukan Pemerasan

Pungutan yang dimaksudkan dalam dalil-dalil tersebut memang haram karena merupakan pemerasan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dalil-dalil tersebut lebih tepat diterapkan pada zaman jahiliah di masa sebelum kenabian, namun setelah kedatangan risalah Islam. Pajak masih ada meski dengan syarat-syarat tertentu, kalau di bandingkan dengan masa kini, Pajak yang haram adalah Pajak pada masa penjajahan, yaitu ketika Pemerintahan Hindia Belanda berkuasa dan memenugut Pajak yang memeras keringat dan darah rakyat. Karena itulah rakyat Negeri ini bersama-sama secara fisik untuk mengusir penjajah, yang tidak lain adalah juga para pemungut Pajak.³¹

Pada saat ini, meski Pajak dikenakan kepada rakyat, tetapi dilaksanakan oleh Negara atas dasar kebutuhan dan persetujuan dari perwakilan rakyat. Jadi, Pajak di masa kini sifatnya disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya Pajak Barang Mewah, tentu hanya dikenakan pada kalangan yang memiliki barang mewah. Kalau kita makan di warung pinggir jalan, harganya tentu murah karena tidak dikenakan Pajak. Sebaliknya, harga makanan di restoran bintang lima menjadi berkali lipat, salah satu faktornya karena dikenakan Pajak.³²

2. Pajak Kembali Untuk Rakyat

³¹ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat....*, h. 400

³² *Ibid.*,

Berbeda dengan pungutan di masa lalu yang diharamkan Pajak saat ini prinsipnya lebih merupakan kesepakatan di antara rakyat untuk bersama-sama membiayai penyelenggaraan Negara. Sehingga uang Pajak dari rakyat pasti akan dikembalikan kepada rakyat dan demi kepentingan rakyat.

Ibarat iuran keamanan dan kebersihan di lingkungan tempat tinggal kita, setiap bulan masing-masing rumah pasti dipungut iuran yang digunakan untuk membayar satpam dan petugas kebersihan. Tentu semua ini demi keamanan dan kebersihan lingkungan. Kita pun tidak mungkin mengatakan bahwa iuran keamanan dan kebersihan sebagai pembayaran yang haram. Justru sebaliknya, pembayaran itu wajib hukumnya.³³

3. Ada Kewajiban Harta Selain Zakat

Pihak-pihak yang mengharamkan Pajak sering berdalil bahwa tidak ada kewajiban dalam urusan harta selain Zakat.

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: “tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat.” (HR. Ibn Mâjah)

Namun, pengertian hadist tersebut tentu tidak tepat jika diterapkan secara acak-acakan. Kalau begitu, nantinya orang yang berutang tidak mau membayar utangnya dengan alasan bahwa agama hanya mewajibkan kita membayar zakat dan bukan membayar utang.³⁴

³³ *Ibid.*, h.400

³⁴ *Ibid.*, h.401

Begitu juga orang yang bernazar untuk memberikan hartanya di jalan Allah, juga akan membatalkan niatnya hanya karena alasan bahwa harta yang wajib ditunaikan sebatas zakat saja. Orang yang melanggar suatu aturan lalu ditetapkan kafaratnya, bisa saja mangkir dan tidak mau membayar, dengan alasan yang sama. Denda kafarat seperti menyembelih kambing, memberi makan enam puluh fakir miskin, atau membebaskan budak dan yang lainnya bisa saja dibatalkan apabila kita keliru dalam memahami dan menerapkan hadist tersebut.³⁵

Sesungguhnya makna hadist tersebut hanya ingin menetapkan bahwa kewajiban dasar dalam Islam adalah zakat. Adapun bila terjadi kasus di mana seseorang berutang, tentu saja dia wajib membayar utangnya. Begitu juga jika kita sepakat untuk menjadi warga suatu Negara dan telah ditetapkan bahwa di antara kewajiban kita sebagai warga Negara adalah membayar Pajak, tentu dengan mudah kita memahami bahwa itu harus kita akui. Ibarat hendak berpergian menumpang pesawat, sebagai penumpang tentu kita wajib membayar tiket. Kita tidak bisa naik pesawat secara gratis dengan alasan bahwa Islam tidak mewajibkan kita membayar apapun kecuali zakat.³⁶

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*dhârûrah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa Pajak (*dhâribah*). Pendapat ini

³⁵ *Ibid.*, 401

³⁶ *Ibid.*,

misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn Al-‘Arabi, Imam Mâlik, Imam Qurtûbi, Imam Syâthibi, Mahmûd Syalthûth.

Diperbolehkannya memungut Pajak menurut para Ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah usul fikih “*mâ lâ yatîm Al-wajib illa bihî fahuwa wâjib*”.

Oleh karena itu Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Muslim.³⁷

Pajak boleh dipungut apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Dilakukan Oleh Pemerintahan Yang Sah Dan Adil

Pajak atau pungutan yang haram adalah yang sifatnya liar dan dipungut oleh oknum di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Pungutan liar yang dilakukan oleh preman termasuk Pajak yang haram. Demikian juga yang dipungut oleh petugas Negara, tetapi di luar batas wewenangnya, merupakan pungutan yang haram hukumnya.

³⁷ Nasrudin, Dewani Romli, “Diskurus Implementasi Zakat dan Pajak Di Indonesia”. Jurnal *Al-Adalah*, Vol. 10, h. 87. (On-line) Tersedia di <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.241>. (Januari 2011)

2. Tidak Mencekik Rakyat

Pajak yang sifatnya mencekik rakyat miskin sehingga membuat kehidupan mereka yang susah menjadi bertambah susah merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Meski Pajak itu ditetapkan oleh Pemerintahan yang sah, namun bila sampai mencekik rakyat, pada dasarnya Pajak itu sebuah kezaliman yang haram hukumnya.³⁸

3. Sepenuhnya Digunakan Untuk Kepentingan Rakyat

Apabila Pajak dipungut oleh Pemerintah kemudian diselewengkan penggunaannya, meski Pajak itu resmi, sama saja dengan penzaliman atas harta rakyat. Dalam kasus ini maka Pajak bisa saja menjadi sesuatu yang zalim.³⁹

2. Ketentuan Umum Denda

a. Pengertian Denda Secara Umum Dan Syari'ah

Denda Secara Umum, adalah hukuman berupa uang karena telah melakukan kesalahan seperti melanggar peraturan, Undang-Undang, dan sebagainya.⁴⁰ Dalam arti yang lain denda adalah hukuman dengan membayar sejumlah uang.⁴¹ Denda diterapkan sebagai pesan teguran dan sebagai alat cara untuk menutupi kekurangan APBN.

Sedangkan, denda Secara hukum fikih dapat disamakan dengan *ta'zīr*. Secara etimologis *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah, tim

³⁸ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat....*, h. 402

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Petter Salim, Yemmy Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 336

⁴¹ Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Umum Dan Politik....*, h. 51

penyusun kamus *Al-mu'jam Al- Wasīth*, mendefinisikan *ta'zīr* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i* seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina.⁴² Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks *Fiqih Jinayah* adalah *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukunya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.”

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak yang tidak ditentukan Al-Qur'ān dan Hadist *ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum *had* atau *kafarat*.⁴³

Selain definisi diatas para ahli juga mendefinisikan *ta'zīr* sebagai berikut:

1. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit*

Ta'zīr merupakan pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i*, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).⁴⁴

2. *Al-Mawardi* dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*.

Ta'zīr ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak luntur oleh ḥudud. Status hukunya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan ḥudud dari suatu sisi, yaitu

⁴² Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Imprint Bumi Akarasa, 2016), h. 93

⁴³ Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 141

⁴⁴ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta:Amzah, 2004), h. 139

sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).⁴⁵

3. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *Jarîmah Al-Risywah fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*.

Ta'zîr adalah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.⁴⁶

4. Abdul Aziz Amit dalam *Al-Ta'zîr fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*

Ta'zîr adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak masuk ke dalam sanksi *ḥad* dan kafarat. *Ta'zîr* sama dengan *ḥudud* dalam fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.⁴⁷

5. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyrî Al-Islamî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Waḍ'î*

Ta'zîr ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *ḥudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, h. 140

⁴⁸ *Ibid.*,

6. Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisân Al-‘Arab*

Ta’zîr ialah hukuman yang tidak termasuk ḥad, berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.⁴⁹

7. Abu Zahra dalam kitab *Al-Jarîmah wa Al-‘Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî*

Ta’zîr ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syari’ (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya⁵⁰.

8. Wahab Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*

Sanksi-saksi *ta’zîr* adalah hukuman-hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya.⁵¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta’zîr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman ḥudud dan kafarat.

b. Konsep *Ta’zîr* Dalam Fiqih Muamalah

Berkaitan dengan transaksi keuangan, dasar hukum untuk menentukan sanksi *ta’zîr* terdapat perbuatan yang harus dihindari, yaitu kezaliman (*zhulm*) dan lalai atau melampaui batas (*al’ta’adi*).⁵² Dalam konsep *fiqih muâmalah*, sanksi *ta’zîr* biasanya sanksi berupa denda (*Al-ghuranah*; *Al-‘uqubah Al-maliyah*). Sanksi berupa denda (*Al-ghuranah*; *Al-‘uqubah Al-maliyah*) merupa hasil ijtihadi. Oleh karena itu, ada ulama

⁴⁹ *Ibid.*, h. 141

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Reflika Aditama, 2018), h. 394

yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya (ikhilâf). Menurut Muhammad Zuhaili, terdapat perbedaan pendapatan ulama mengenai sanksi *ta'zîr* berupa denda, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Imam Abu Yusuf (pengikut dan murid Imam Ahnu Hanifa) membolehkan adanya sanksi berupa *ta'zîr* kebendaan, misalnya denda. *Kedua*, jumhur (mayoritas) ulama melarangnya kepada khawatir akan terjatuh ke dalam *riba* atau pengambilan harta milik pihak secara zalim karena bukan haknya.⁵³

Menurut Rafiq Yunus dalam kitabnya *fiqh Al-Muâmalah Al-Mâliyah* menjelaskan dibolehkannya sanksi berupa denda (*Al-ghuramah*; *Al-'uqubah Al-maliyah*), yaitu menganalogikan pada hukum zakat. Pihak yang menolak membayar zakat boleh dikenakan sanksi dengan cara diambil (secara paksa) setengah dari hartanya.⁵⁴

c. Dasar Hukum Denda Secara Umum dan Syari'ah

Dasar Hukum Denda dalam Hukum Positif, dasar pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain. Dasar Hukum Denda dalam Hukum Islam, disyariatkannya *ta'zîr* terdapat dalam hadis Nabi dan *ijma'* para ulama. Adapun urainnya adalah sebagai berikut:

⁵³ *Ibid.*, h.395

⁵⁴ *Ibid.*

Hadist

Berikut ini adalah beberapa hadist tentang *ta'zīr*⁵⁵:

Hadist 1

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: “Dari Abi Burdah Al-Anshari ia mendengar Rasulullah bersabda ‘tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah’” (HR. Muttafaq ‘alaih).⁵⁶

Hadist 2:

عَنْ بَزْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَسَ رَجُلًا فِي تُحْمَةٍ

Artinya: “Dari Bahnz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi Muhammad SAW. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’I, dan Baihaqi. Disahihkan oleh Hakim)⁵⁷.

⁵⁵ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*...., h. 141

⁵⁶ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Piihan Bukhārī-Muslim*, penerjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul-Falah, cet VII, 1992)., h. 908

⁵⁷ Al-Syaid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, jilid II, 1980)., h. 497

Ijma' (konseus)

Para ulama telah berkonseus (bersepakat), bahwa disyariatkannya hukuman *ta'zīr* dalam syariat Islam. Adapun urutannya sebagai berikut:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ التَّعْزِيرِ فِي
كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَّةَ
رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ
مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا حَدَّ كَفَّارَةٍ

Artinya : “Ibnu Tamiyah berpendapat: Bahwa para ulama telah bersepakat bahwasannya *ta'zīr* disyariatkan pada setiap kemaksiatan yang bukan dikategorikan sebagai tindakan had dan tidak pula kafarat.”⁵⁸

d. Kompetensi Pemberlakukan Ta'zīr

Pihak yang berhak memberikan hukuman *ta'zīr* kepada pelanggar hukum syar'i selain penguasa atau Hakim adalah orangtua untuk mendidik anaknya suami mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau Hakim, terkait jaminan keselamatan ter hukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi *ta'zīr*.⁵⁹

⁵⁸Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Reflika Aditama, 2018), h. 393 mengutip Taqi Al-Din Abu Al-'Abbaas Ahmad Ibn Abn Al-Halim Ibn Tamiyah Al-Harani, *Majmû' Al-Fatâwâ, Dâr*

⁵⁹Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h.94

Menurut Imam Al- *Syāfi*'I dan Abu Hānifah, memberikan hukuman *ta'zīr* oleh selain penguasa atau Hakim harus terkait dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau Hakim yang memang *ta'zīr* ditugaskan oleh syariat.

Maksud pemberlakuan *ta'zīr* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* bagi penguasa atau Hakim sama dengan pelaksanaan hukum *ḥudud*. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru terhadap muridnya, hanya terbatas pada hukum *ta'zīr*, tidak sampai kepada hukum *ḥudud*.⁶⁰

e. Tujuan Dan Syarat-syarat Sanksi *Ta'zīr*

Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr*:⁶¹

- 1) Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
- 2) Respentif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi
- 3) Kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku
- 4) Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku. Selain pemberlakuan tujuan *ta'zīr* diatas pemberlakuan *ta'zīr* juga bertujuan untuk:

Pertama, hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Menurut Mazhab Mālikī dan Syāfi'I diperbolehkan menggabungkan hukuman-hukuman pokok had dengan

⁶⁰ *Ibid.*, h.93.

⁶¹ *Ibid.*, h.94.

hukuman tambahan *ta'zīr*, seperti mengalungkan tangan pencuri (hukuman tambahan) setelah tangan tersebut dipotong (hukuman pokok).

Kedua, hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (*syubhat*) menurut penilaian Hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Karena kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarimah hudud* atau *qisas*, mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi jarimah *ta'zīr*, demikian pula adanya keraguan atau *syubhat* dalam proses penanganan *jarimah hudud* atau *qisas*, oleh karena itu status jarimah berpindah dari *hudud* atau *qishash* menjadi *jarimah ta'zīr*. Jadi, hukuman *ta'zīr* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan.⁶²

Ketiga, hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokok jarimah *ta'zīr* syara', seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa ada sebagian kecil jarimah *ta'zīr* yang ditentukan jarimahnya oleh syara' dalam jumlah terbatas. Namun, bagi jarimah ini syara' tidak menentukan apa bentuk hukumannya. Sanksi bagi para pelaku yang melanggar jarimah ini diambil dari sejumlah hukuman yang khusus bagi jarimah *ta'zīr*, yang terdiri atas

⁶² Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam....*, h.144

berbagai hukuman, baik hukuman jiwa, anggota badan, kebebasan, dan hukuman atas harta maupun psikologis.⁶³

3. Sumber Pendapatan Negara Indonesia

Sumber-sumber pendapatan Negara di Indonesia, secara garis besarnya berasal dari dua sumber yaitu:⁶⁴

1. Pendapatan Negara:

a. Pajak Dalam Negeri

- 1.) Pajak penghasilan
- 2.) Pajak Pertambahan Nilai
- 3.) Pajak Bumi dan Bangunan
- 4.) BPHTB
- 5.) Cukai
- 6.) Pajak lainnya

b. Pajak Perdagangan Internasional

- 1.) Bea masuk
- 2.) Bea Keluar

2. Penerimaan bukan Pajak:⁶⁵

- a. Penerimaan SDA
- b. Bagian Laba BUMN
- c. PNBPN Lainnya
- d. Pendapatan BLU

⁶³ *Ibid.*, h.145.

⁶⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Depok: Rajawali Pres, 2009), h. 2

⁶⁵ *Ibid.*,

Sebenarnya jika dikaji secara yuridis, norma hukum yang terdapat pada tiga ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 ternyata jenis penerimaan Negara bukan Pajak beraneka ragam, bergantung pada pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh terbukanya peluang untuk menentukan jenis penerimaan Negara bukan Pajak sepanjang persyaratan tersebut dipenuhi. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah bahwa jenis penerimaan Negara bukan Pajak harus ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.⁶⁶ Kelompok penerimaan Negara bukan Pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 meliputi:⁶⁷

- 1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain, penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin.
- 2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan, dan royalti di bidang pertambangan khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumi walaupun sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Pertambangan minyak dan gas bumi Negara terdapat unsur royalti, namun karena di dalamnya terkandung banyak unsur Perpajakan, maka penerimaan yang

⁶⁶ Muhammad Djafar Saidi, Rohana Hueseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 31

⁶⁷ *Ibid.*, h. 32

merupakan bagian Pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis penerimaan Negara bukan Pajak.

- 3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain, dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah.
- 4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, kesehatan, pelatihan, pemberian hak paten, merk, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.⁶⁸
- 5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain, lelang barang, rampasan Negara, dan denda.⁶⁹
- 6) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah adalah bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar Negeri, baik Swasta maupun Pemerintah yang menjadi hak Pemerintah. Hibah dalam bentuk natural, antara lain yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁷⁰
- 7) Penerimaan lainnya yang di atur dalam Undang-Undang tersendiri.

Hal ini membuktikan bahwa ada penerimaan Negara selain Pajak

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*, h.32

dan penerima Negara bukan Pajak yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 karena terlebih dahulu diatur dengan Undang-Undang tersendiri.⁷¹

Kelompok penerimaan Negara bukan Pajak tersebut di atas ditetapkan dengan peraturan Pemerintah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan Pemerintah terhadap kelompok jenis penerimaan Negara bukan Pajak dimaksud. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perincian dari kelompok penerimaan Negara bukan Pajak sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Di samping itu, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi bagi mereka yang diberi wewenang untuk mengelolanya. Itulah sebabnya, penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 menegaskan bahwa jenis penerimaan Negara bukan Pajak ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. Kemudian, dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁷²

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*, h.32

3. Sumber Pendapatan Negara Islam

Table 1. Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam⁷³

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif
1.	Ghanimah	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu
2.	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu
3.	'Ushr Shadaqah	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tetap
4.	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap
5.	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak Tetap
6.	'Ushr Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang Dagang	Tidak Tetap
7.	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap
8.	Pajak (Dharibah)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap

⁷³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h.77

4. Klasifikasi Pendapatan Negara

Pendapatan utama Negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*, berdasarkan sumbernya dapat di klasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: *Ghanimah*, *Shadawah*, dan *Fay'i*. Ibnu Taimiyah dalam mengklasifikasikan seluruh sumber pendapatan Negara mempertimbangkan asal-usul dari seluruh sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar *ghanimah* dan sedekah, berada di bawah nama *fay'i*.

Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*, adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber-sumber pendapatan Negara tersebut. Melakukan klasifikasi seperti ini sangat penting, karna pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara dan tidak boleh di campur sama sekali.⁷⁴

Sumber-sumber pendapatan Negara dan jenis pengeluaran Negara telah ditentukan oleh Allah Swt. dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, Ulil Amri tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan dan pengeluaran yang baru. Kalau diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan Negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Pendapatan Tidak Resmi Negara dan (2) Pendapatan Resmi Negara.

Pendapatan tidak resmi Negara, yang terdiri dari *ghanimah* dan *shadagah*. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian karena

⁷⁴ *Ibid.*, h. 75

diperuntukkan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun Negara bertanggung jawab atas pengumpulannya (*amil*), namun Negara wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut (tujuan sedekah dan *ghanimah*).⁷⁵

Pendapatan resmi Negara, yang terangkum dalam satu kesatuan nama *fay'i*, terdiri dari *jizyah*, *kharaj*, *'ushr*-bea cukai. Maksud pendapatan resmi (disebut juga pendapatan penuh) di sini adalah pendapatan di Negara berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Karena manfaat *fay'i* dapat digeneralisasi, maka penguasa bebas menggunakannya untuk kebaikan umum masyarakat.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara *ghanimah*, *fay'i*, dan sedekah (zakat), antara lain sebagai berikut:⁷⁶

1. *Ghanimah* dan *fay'i* adalah harta yang didapatkan kaum Muslim dari kaum musyrikin, atau mereka menjadi penyebab perolehan harta tersebut, sedangkan zakat adalah murni diperoleh dari kaum mana Muslim.
2. *Ghanimah* dan *fay'i* dikenakan untuk menghukum mereka, sedangkan zakat untuk membersihkan dan menyucikan mereka.
3. Distribusi *ghanimah* dan *fay'i* dapat diserahkan kepada ijtihad ulama, sedangkan distribusi zakat tidak boleh berijtihad di dalamnya.

⁷⁵ *Ibid.*, h.76

⁷⁶ *Ibid.*,

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Citra Biovika Fauziah (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembayaran denda pada keterlambatan SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sedangkan dalam metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dalam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk member efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad).
2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Reza Anggryawan Setya Pamungkas (2017) yang berjudul “Mekanisme Pertimbangan Hukum Terhadap Denda Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi denda Pajak kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari M.Rif'at Hanin Hidayat (2017) yang berjudul "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad *murabahah*. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan memahami secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa hasil wawancara, dan sekunder dari kajian pustaka.

Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah *riba* atau tidak.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan suatu denda. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Pasal 44B Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Prespektif Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Piihan Bukhārī-Muslim, Cet. Ke- VII, Penerjemah Kathur Suhardi*, Jakarta: Darul-Falah, 1992.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopdeia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Ahmad Komara, *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Syaid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980
- Ardian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Brothodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akarsa, 2012.
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntut Praktis* Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Depok: Rajawali Pres, 2009.
- Husin Sayuti, *Pengantar Metodelogi Riset*, Jakarta:Fajar Agung, 1989.
- Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia* Jakarta: Gelora Angkasa Pratama, 2002
- Mardiasmono, *Perpajakan Edisi revisi 2006*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- , *Perpajakan, Edisi revisi 2008*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008
- , *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Muhammad Djafar Saidi, dan Rohana Hueseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta:Amzah, 2004.

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Imprint Bumi Akarasa, 2016.

Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Reflika Aditama, 2008.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 23A

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1).

Petter Salim, dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1993.

Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka, 2006.

Santoso Brothofiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Syakh Musthafa Deib Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Islam Syāfi'i*, Kemang: Fatha Media Prima, 2018.

Syarifuddin, dan Amir, *Ushul Fiqih Cet ke-I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sonny Agustinus, dan Isnianto Kurniawan, *Panduan praktis perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Gitamedia Press, 2015.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 23A

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1).

Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Edisi X buku 1* Jakarta: Salemba Empat, 2011

Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Umum dan Politik*, Bandung: Angkasa, 1996.

Jurnal dan Berita

Detik.com “Kejagung: PT. Asian Agri Lunasi Denda Rp. 2,5 Triliun” (On-line), tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-2698916/kejagung-pt-asian-agri-lunasi-denda-rp-25-triliun>

Evie Rachmawati Nur Ariyanti, “Pembatasan Frasa Perubahan Kesekian Kali Pada Perumusan Judul Undang-Undang Telaah Terhadap Undang-Undang Perpajakan”. *Jurnal Adil*, Vol. 3 No.2, hal.442 (On-line) Tersedia di <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/articel/viewFile/64/45> (2019).

Nasrudin, Dewani Romli, “Diskurus Implementasi Zakat dan Pajak Di Indonesia”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, hal. 87. (On-line) Tersedia di <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.241>. (Januari 2011)

